



2025-2029

RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Tahun 2025–2030 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, serta sasaran pembangunan yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Bapperida dalam periode lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra ini mengacu pada visi, misi, dan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah, serta memperhatikan keterpaduan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Dalam proses penyusunannya, Renstra Bapperida disusun melalui tahapan analisis yang sistematis, dimulai dari evaluasi kinerja periode sebelumnya, identifikasi permasalahan dan tantangan strategis, hingga perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Renstra ini diharapkan mampu menjadi pedoman kerja yang terukur bagi seluruh jajaran Bapperida dalam mendukung perwujudan tata kelola perencanaan pembangunan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap tim penyusun dan seluruh jajaran Bapperida yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Harapannya, Renstra Bapperida 2025–2030 dapat menjadi acuan bersama dalam melaksanakan tugas perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah secara terarah, konsisten, serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Akhirnya, semoga dokumen ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja Bapperida dan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang lebih baik di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 6

 1.4 Sistematika penulisan..... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 11

 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 11

 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;..... 11

 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah; 22

 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah 33

 2.1.4 Kelompok sasaran layanan..... 48

 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 49

 2.2.1 Permasalahan 49

 2.2.2 Isu Strategis 51

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 53

 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 53

 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra
 Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 57

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 67

 4.1 Uraian Program; 67

 4.2 Uraian Kegiatan..... 70

 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif; 76

 4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;..... 125

 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-
 2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;..... 129

 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui
 indikator Kinerja Kunci (IKK)..... 130

BAB V PENUTUP 132

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin23

Tabel 2. 2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan.....24

Tabel 2. 3 Jumlah pegawai berdasarkan eselonering.....25

Tabel 2. 4 Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan25

Tabel 3. 1 Tujuan,Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target.....55

Tabel 3. 2 Rumus perhitungan indikator sasaran.....56

Tabel 3. 3 Penahapan Rencana Prioritas58

Tabel 3. 4 Strategi dan arah kebijakan.....60

Tabel 4. 1 Program Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.....68

Tabel 4. 2 Program, Kegiatan, Target dan Pagu Indikatif 2026-203071

Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah77

Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....89

Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....125

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama129

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci.....131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Gambar Crosscutting BAPPERIDA.....65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki peran penting dalam menjalankan pembangunan dengan memperhatikan tujuan dan arah kebijakan nasional dan regional. Hal tersebut dimandatkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan amanat tersebut, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk menyusun kebijakan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Pasca pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Startegis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD. Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Perencanaan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan nasional maka diperlukan penyelarasan antara RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029, penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD menjabarkan visi dan misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sekaligus merupakan upaya mendukung secara seiring sejalan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) proyek Hasil Terbaik Cepat yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam

memperkuat sinergi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025–2029 yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 1 ayat 7 Renstra adalah dokumen Rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembanguinan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan, riset, dan inovasi di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memegang peran sentral dalam memastikan integrasi perencanaan pembangunan lintas sektor, berbasis data dan bukti ilmiah, serta berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Bapperida menjadi langkah krusial dalam menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra Bapperida Tahun 2025–2029 dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mempertimbangkan dinamika pembangunan global, nasional, dan lokal, termasuk tantangan perubahan iklim, transformasi digital, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman strategis dalam mengarahkan kinerja organisasi menuju peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Dengan demikian, dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen manajerial dan strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam Inmendagri No. 2 Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) adalah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Renstra ini juga menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah 2025-2029 yang sejalan dengan visi nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2025–2029.

Tujuan Penyusunan Renstra BAPPERIDA adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi, kebijakan, dan arah pembangunan yang konkret dan terukur sesuai kewenangan BAPPERIDA.
- b. Mengintegrasikan agenda pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, khususnya delapan program prioritas pembangunan nasional (Asta Cita 2025–2029)
- c. Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja), penganggaran, dan evaluasi kinerja tahunan, sehingga menjamin konsistensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA.
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis data, inovatif, dan responsif terhadap dinamika global, nasional, dan lokal.
- e. Mendorong penguatan riset dan inovasi daerah sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Rensta PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Menguraikan secara rinci mengenai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah

Menguraikan kondisi dan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah, meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran, serta sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari

tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan.

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Memuat identifikasi kelompok masyarakat, lembaga, atau pihak lain yang menjadi sasaran langsung maupun tidak langsung dari pelayanan perangkat daerah, serta menjelaskan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok sasaran sebagai dasar dalam perencanaan program dan kegiatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Menyajikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil pelayanan, serta faktor penyebab dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2.2.2 Isu Strategis

Memuat rumusan isu-isu strategis yang dihadapi perangkat daerah, berdasarkan analisis terhadap gambaran umum, permasalahan pelayanan, serta hasil evaluasi internal dan eksternal. Isu strategis menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Memuat tujuan strategis perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah, serta diturunkan ke dalam sasaran, strategi pencapaian, dan arah kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Menjabarkan tujuan strategis perangkat daerah yang diturunkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran mencerminkan hasil antara yang ingin dicapai selama periode renstra, serta menjadi dasar

penyusunan indikator kinerja dan perumusan program/kegiatan.

3.3 Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Memuat strategi dan arah kebijakan yang disusun sebagai pendekatan utama perangkat daerah dalam menjawab isu strategis, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam periode rencana strategis.

3.4 Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Memuat arah kebijakan yang menjadi pedoman dan langkah-langkah strategis perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Memuat uraian lengkap mengenai program-program prioritas yang akan dilaksanakan selama periode Renstra, beserta penjelasan tujuan, sasaran, indikator, serta sinergi antar program dan kaitannya dengan arah kebijakan.

4.2 Uraian Kegiatan

Memuat penjelasan detail mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari program prioritas perangkat daerah selama periode Renstra.

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Menjelaskan detail dari subkegiatan sebagai langkah pelaksanaan kegiatan, lengkap dengan ukuran kinerja, target capaian, dan estimasi anggaran.

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Uraian subkegiatan menjelaskan rincian aktivitas spesifik yang langsung mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Setiap subkegiatan memuat informasi tentang output, indikator, target, dan pagu indikatif anggaran.

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai alat ukur dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah selama periode Renstra.

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK)

Menjelaskan tentang pencapaian hasil kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset dan penelitian, inovasi dan pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perencanaan pembangunan, riset dan penelitian, inovasi dan pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi serta statistik daerah;
- c. pengoordinasian Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. menghimpun, memfasilitasi, membina dan melaporkan pembuatan/ pengembangan riset dan inovasi di daerah;
- e. pengendalian kesesuaian antar indikator, kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), output hasil kegiatan di Rencana.

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan Program kerja, tata kerja, dan pengembangan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok Badan

Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan mengadakan hubungan 12dalah1212a dengan Instansi lainnya sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan Penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian kebijakan dibidang perencanaan, pengendalian, evaluasi Pembangunan Daerah, riset, inovasi daerah, Kesra, Kependudukan, Pemerintahan, perekonomian, SDA serta infrastruktur dan pengembangan wilayah dan Kesekretariatan;
- d. penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
- e. penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. penyusunan prakiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten dan Provinsi serta pihak lainnya;
- i. pembinaan peyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- j. perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- k. peningkatan nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Badan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Badan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja

Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian serta bimbingan dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan peraturan perundang-undangan, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, humas, ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Badan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretaris Badan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja

sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, melakukan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, serta pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas:

- a. penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian melalui Daftar Urut Kepangkatan (DUK), dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. pengonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan para Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Perencana lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- j. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- k. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- l. pengoordinasian peningkatan disiplin aparatur;
- m. pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- n. pelaksanaan tugas organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan; dan

- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola, dan melaporkan pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, membina dan membimbing terhadap bendahara dan penatausahaan keuangan serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. pengajuan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan para Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Perencana lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Kepala Subbagian Keuangan dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Mengoordinasikan,

merencanakan, menyusun program dan kegiatan pengembangan pembangunan daerah, menyinkronkan kebijakan operasional dan program, menyusun rencana strategis, memberikan layanan teknis dibidang perencanaan. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pembangunan mengoordinasikan kegiatan pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan perencanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, sosial politik, ekonomi dan budaya, melalui pendekatan holistik-tematik, integratif, spasial;
- b. pengoordinasian perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada aspek pemerintahan, pembangunan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat serta aspek potensi pengembangan daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. pengoordinasian perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;
- e. penganalisaan dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- f. pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah
- h. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- i. pengoordinasian dan penyinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- j. pengevaluasian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- k. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- l. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- m. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- n. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- o. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- q. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- r. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan melaksanakan penyiapan bahan dalam melakukan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila di Bidang Sosial Politik, ekonomi dan budaya, serta penyiapan bahan rencana program kegiatan dan pelaksanaan dokumentasi dan penyediaan informasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program serta petunjuk teknis penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perumusan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan, Pembangunan Sosial Politik, pengembangan potensi dan keuangan daerah;

- c. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan pada aspek Pemerintahan dan Pembangunan daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;re
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan Instansi lain dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial politik, pengembangan bidang potensi ekonomi dan keuangan daerah;
- h. pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- i. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- j. penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- k. penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- l. pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- n. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- o. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan bawahan melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- p. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan

Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan

Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah di bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Tenaga Kerja, Perpustakaan Kearsipan, Sosial, Budaya, Trantibum, Linmas, Adminduk Capil, Pemerintahan dan Transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
- g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;

- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pertanian, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk kelompok kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kelompok kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD untuk kelompok kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- f. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional untuk kelompok kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah untuk kelompok kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah di bidang PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman, komunikasi, Informasi dan Perhubungan serta Pengkajian Kewilayahan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

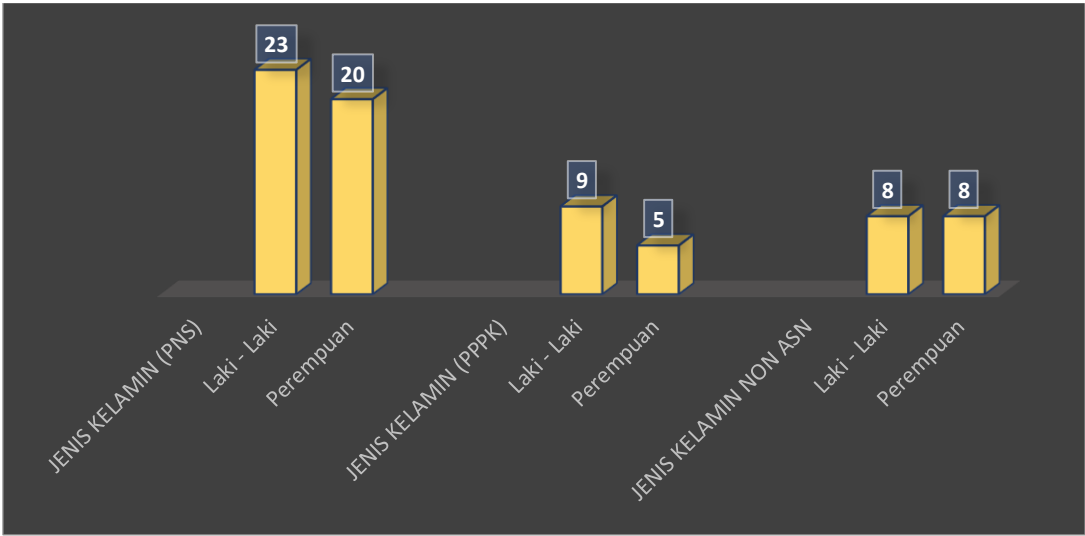
Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kualitas dan kuantitas SDM sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program, pencapaian sasaran strategis, serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja perangkat daerah. Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebanyak 73 orang, terdiri dari PNS, PPPK, dan Tenaga Non ASN yang jumlahnya dapat dilihat pada diagram gambar berikut:

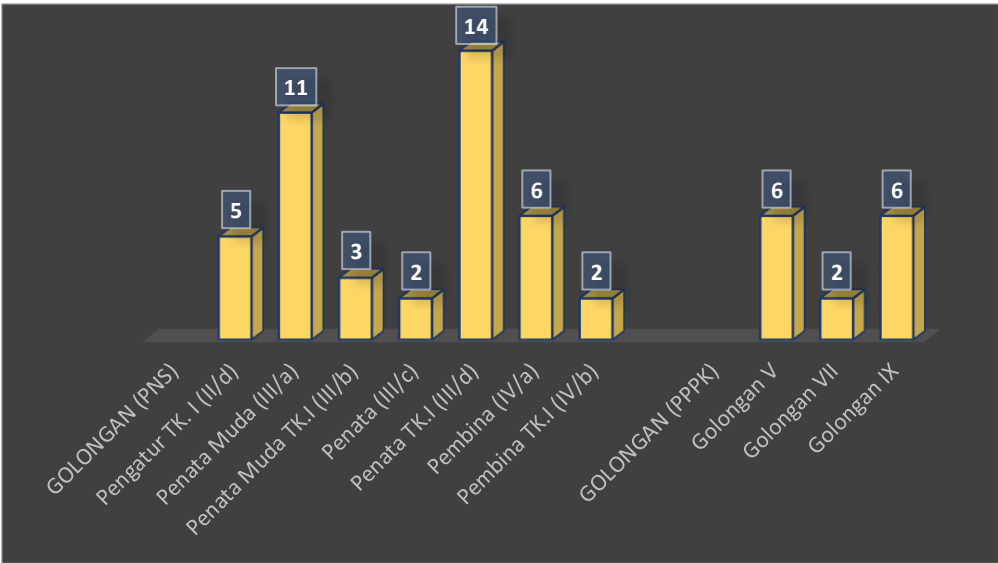
Tabel 2. 1 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin



Komposisi pegawai di Bapperida saat ini menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan. Kondisi ini menggambarkan kecenderungan distribusi sumber daya manusia yang, secara historis maupun struktural, masih didominasi oleh laki-laki, terutama pada jabatan teknis dan struktural yang menuntut mobilitas tinggi, beban kerja lapangan, serta tanggung jawab manajerial yang lebih besar. Kondisi ini secara tidak langsung mencerminkan pola penempatan pegawai berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi, kompetensi, dan ketersediaan SDM. Dalam konteks pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bapperida yang meliputi perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah, keberadaan pegawai laki-laki yang lebih banyak memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan intensitas kerja tinggi, mobilitas wilayah, serta keterlibatan langsung dalam forum-forum teknis lintas perangkat daerah.

Namun demikian, hal ini tidak mengurangi peran strategis pegawai perempuan yang tetap menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja organisasi, khususnya pada bidang-bidang yang memerlukan ketelitian administratif, analisis kebijakan, serta kemampuan koordinatif dan komunikatif. Keseimbangan peran berdasarkan kapasitas dan kompetensi tetap menjadi prinsip utama dalam penugasan dan pengembangan karier pegawai, tanpa memandang gender. Dengan demikian, meskipun jumlah pegawai laki-laki lebih dominan, struktur organisasi dan distribusi tupoksi tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja Bapperida secara optimal, melalui pendekatan profesional dan proporsional sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing.

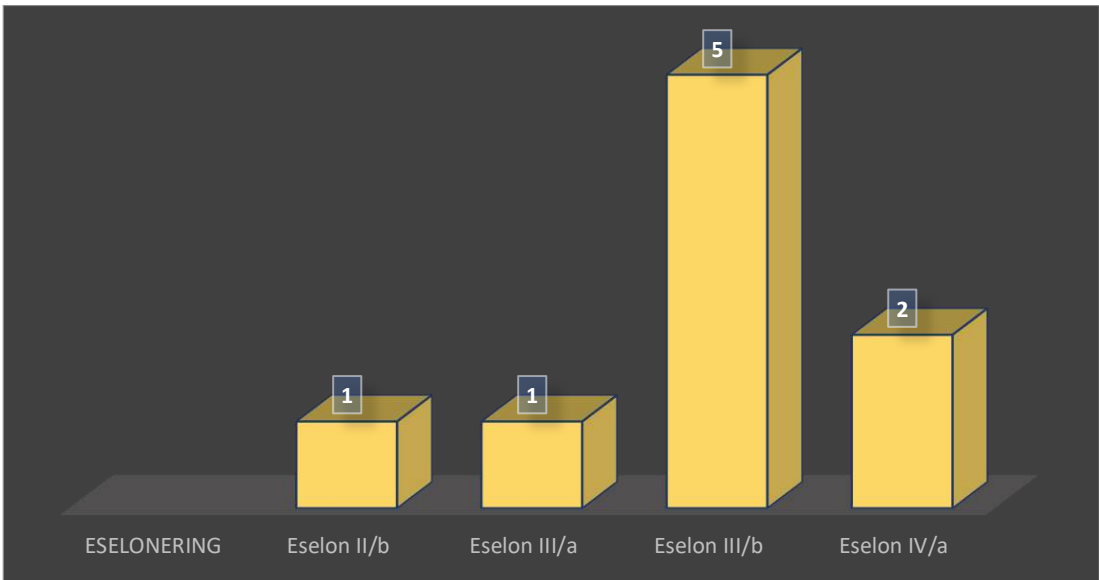
Tabel 2. 2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan



Berdasarkan Gambar 2.2, terlihat bahwa komposisi pegawai Bapperida didominasi oleh ASN dengan golongan III dan IV. Jumlah tertinggi berada pada golongan Penata Tk I (III/d) sebanyak 14 orang, disusul oleh Penata Muda Tk I (III/b) sebanyak 11 orang, dan Pembina (IV/a) sebanyak 6 orang. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar pegawai Bapperida berada pada jenjang kepangkatan menengah hingga senior, yang umumnya memiliki pengalaman, keahlian, dan pemahaman yang cukup terhadap bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah. Distribusi ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia di Bapperida secara umum telah memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis, pengelolaan data pembangunan, hingga fasilitasi inovasi daerah. Dominasi pegawai pada golongan III dan IV juga mencerminkan kesiapan kelembagaan dalam menyelenggarakan fungsi koordinatif dan analitis, yang menjadi karakteristik utama peran Bapperida. Selain ASN, terdapat pula pegawai dengan status PPPK yang tersebar di golongan VII dan IX, masing-masing sebanyak 6 orang, yang menunjukkan keterlibatan SDM non-ASN dalam mendukung kinerja organisasi. Meski berada pada sistem kepegawaian yang berbeda, peran PPPK tetap strategis dalam pelaksanaan kegiatan operasional maupun teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Secara keseluruhan, komposisi pegawai berdasarkan golongan ini memberikan gambaran bahwa Bapperida memiliki SDM yang cukup memadai dari segi jenjang karier dan kapasitas fungsional, meskipun upaya peningkatan kompetensi, regenerasi pegawai, dan

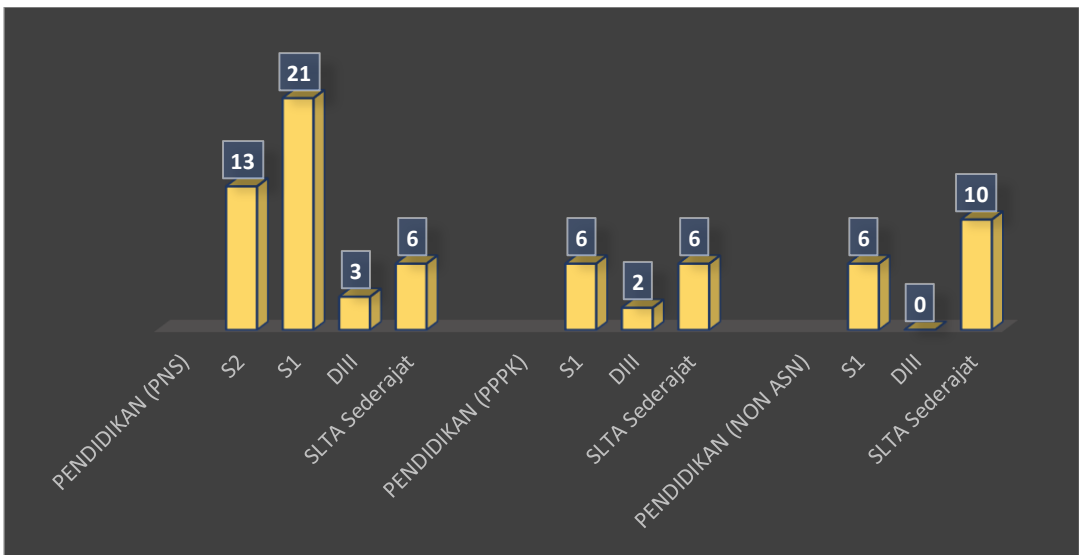
pemerataan distribusi tugas tetap menjadi fokus dalam penguatan kelembagaan ke depan.

Tabel 2. 3 Jumlah pegawai berdasarkan eselonering



Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, usia, dan jabatan menunjukkan sebaran yang relatif merata pada masing-masing unit kerja, meskipun terdapat beberapa kebutuhan akan penambahan pegawai pada bidang teknis tertentu. Sebagian besar pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya. Namun, peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis, manajerial, dan fungsional masih diperlukan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas.

Tabel 2. 4 Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan



Pendidikan berperan penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, profesional, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah. Bapperida sebagai institusi yang mengemban tugas strategis

dalam perencanaan, pengembangan, dan inovasi daerah, memerlukan pegawai dengan latar belakang pendidikan yang relevan dan mumpuni. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan formal, pelatihan teknis, dan pengembangan kompetensi perlu terus didorong sebagai investasi jangka panjang dalam mendukung kualitas pelayanan perencanaan dan kebijakan di daerah.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Bapperida Kabupaten Barito Selatan. Keberadaan dan kelengkapan aset ini tercatat secara sistematis dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang dikelompokkan berdasarkan jenis dan klasifikasinya, yakni KIB A, B, C, D, dan E. Berikut penjelasan masing-masing klasifikasi:

• KIB A – Tanah

Aset tanah milik Bapperida tercatat sebagai prasarana utama, yang menjadi dasar keberadaan bangunan dan fasilitas fisik lainnya. Tanah ini digunakan sebagai lokasi kantor dan area pendukung seperti halaman, parkir, serta taman. Kepemilikan dan status hukum tanah telah dicatat sesuai ketentuan sebagai Barang Milik Daerah.

Tabel. 2.5 Kepemilikan dan Status Hukum Tanah Sebagai BMD

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	LUAS (M2)	TGL. PEROLEHAN	LETAK / ALAMAT	STATUS TANAH			PENGGU NAAN	SASAL-USUL	N I L A I		KETERANGAN
					HAK	SERTIFIKAT				PEROLEHAN	AKHIR	
						TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	373	31/12/1995	Jl. Pahlawan Km 6	HAK PAKAI	03/07/1999	AN. 559428	Perumahan Dinas	APBD	6.400.000,00	6.400.000,00	SERTIFIKAT NO. AN. 559428
2.	Tanah Bangunan Kantor BAPPEDA Kab. Barsel	9.708	31/12/1995	Jl.Pahlawan Km 6 Buntok	HAK PAKAI	02/02/2017	BW. 761001 (P.175)	Gedung Kantor	APBD	255.000.000,00	255.000.000,00	SERTIFIKAT NO. BW. 761001 (P.175)

• KIB B – Peralatan dan Mesin

Pada KIB B tercatat berbagai sarana kantor berupa peralatan dan mesin yang digunakan langsung dalam operasional harian. Ini mencakup komputer, printer, mesin fotokopi, proyektor, kendaraan dinas roda dua dan roda empat, serta peralatan kerja lainnya. Aset-aset ini menunjang efektivitas kerja pegawai, khususnya dalam proses perencanaan, pengendalian, serta inovasi daerah.

• **KIB C – Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan kantor Bapperida diklasifikasikan dalam KIB C, yang termasuk prasarana fisik permanen. Gedung kantor digunakan untuk ruang kerja, ruang rapat, ruang arsip, dan fasilitas pendukung lainnya. Kondisi gedung umumnya baik dan terus dilakukan pemeliharaan agar layak digunakan sebagai tempat pelayanan publik dan pengembangan perencanaan daerah.

• **KIB D – Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Meskipun skala kepemilikannya terbatas, KIB D mencatat prasarana berupa akses jalan internal dan jaringan pendukung yang melekat pada fasilitas kantor. Misalnya jaringan Listrik, jaringan air bersih, dan sarana komunikasi internal yang dibutuhkan dalam mendukung kelancaran aktivitas organisasi.

• **KIB E – Aset Tetap Lainnya**

Klasifikasi KIB E mencakup barang kesenian, perpustakaan, dan aset non-mesin lainnya, seperti lukisan, foto dokumentasi, figura, dan perlengkapan ruangan. Aset ini memiliki nilai estetika dan dokumentatif, sekaligus sebagai pelengkap lingkungan kerja yang representatif dan inspiratif.

Tabel 2. 6 Daftar Sarana dan Prasarana Bapperida

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1	4	5
1.	Persediaan	-
	Barang Pakai Habis	-
	Barang Tak Habis Pakai	-
	Barang Bekas Dipakai	-
2.	Tanah	2
	Tanah	2
3.	Peralatan Dan Mesin	438
	Alat Besar	-
	Alat Angkutan	25
	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1
	Alat Pertanian	-
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	272
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	23
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	-
	Alat Laboratorium	-
	Alat Persenjataan	-
	Komputer	117

	Alat Eksplorasi	-
	Alat Pengeboran	-
	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-
	Alat Bantu Eksplorasi	-
	Alat Keselamatan Kerja	-
	Alat Peraga	-
	Peralatan Proses/Produksi	-
	Rambu – Rambu	-
	Peralatan Olah Raga	-
4.	Gedung Dan Bangunan	9
	Bangunan Gedung	9
	Monumen	-
	Bangunan Menara	-
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-
5.	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	2
	Jalan Dan Jembatan	-
	Bangunan Air	-
	Instalasi	-
	Jaringan	2
6.	Aset Tetap Lainnya	1
	Bahan Perpustakaan	-
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1
	Hewan	-
	Biota Perairan	-
	Tanaman	-
	Barang Koleksi Non Budaya	-
	Aset Tetap Dalam Renovasi	-
7.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
8.	Akumulasi Penyusutan	-
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin	-
	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	-
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-
9.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-
	Sewa	-
	Kerjasama Pemanfaatan	-
	Bangun Serah Guna / Bangun Guna Serah	-
	Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	-
10.	Aset Tidak Berwujud	-
	Aset Tidak Berwujud	-
11.	Aset Lain-Lain	9
	Aset Rusak Berat/Usang	8
	Aset Dalam Proses Hibah	-

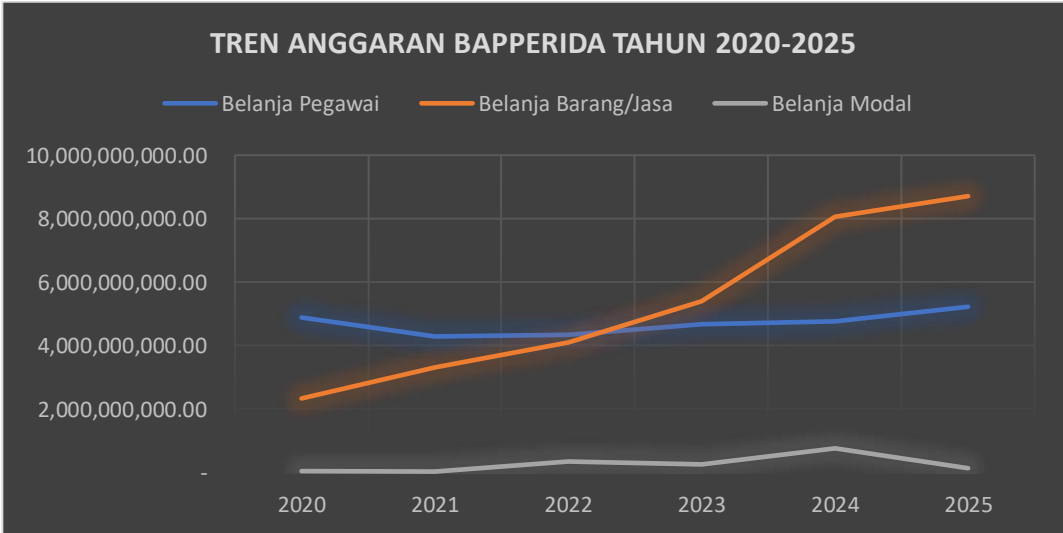
	Aset Dalam Proses Lelang	-
	Aset Dalam Penelusuran	1
	Koreksi/Double Catat	-
	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-
	Reklasifikasi Persediaan	-
12.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-
13.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-
Jumlah		461

3. Anggaran

Anggaran memegang peranan sentral sebagai salah satu sumber daya utama dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, anggaran tidak hanya dipandang sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai wujud konkret dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Kapasitas fiskal atau anggaran merupakan faktor penting yang menentukan ruang gerak perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Evaluasi terhadap anggaran mencakup analisis terhadap besaran pagu anggaran, tren alokasi dari tahun ke tahun, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran, serta kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Anggaran yang memadai dan dikelola secara akuntabel akan menunjang pencapaian target kinerja secara optimal.

Tabel 2. 7 Tabel Tren Anggaran 2020-2025



Grafik tren anggaran Bapperida Kabupaten Barito Selatan menunjukkan dinamika alokasi belanja dalam periode tahun 2020 hingga 2025, yang dikelompokkan ke dalam tiga jenis belanja utama, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal dengan penjelasan berikut ini :

Komposisi anggaran Bapperida tahun 2020–2025 didominasi oleh belanja barang/jasa yang mengalami lonjakan signifikan, terutama setelah 2023. Belanja pegawai cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi, sementara belanja modal relatif kecil dan berfluktuasi, namun tidak menunjukkan tren peningkatan jangka panjang. Peningkatan belanja barang/jasa yang signifikan mencerminkan fokus Bapperida pada penguatan program, kegiatan, dan operasional dibandingkan belanja modal atau belanja pegawai.

1. Belanja Pegawai

Pada tahun 2020 tercatat sekitar Rp5 miliar, kemudian mengalami penurunan pada 2021 hingga mendekati Rp4 miliar. Setelah itu, belanja pegawai relatif stabil dengan tren sedikit meningkat hingga mencapai kisaran Rp5,2 miliar pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk belanja pegawai relatif terjaga, meskipun sempat turun pada awal periode.

2. Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2020 tercatat sekitar Rp2,5 miliar dan terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2023 ke 2024, dari sekitar Rp5,5 miliar melonjak menjadi Rp8 miliar. Hingga 2025, belanja barang/jasa mencapai sekitar Rp8,5 miliar, menjadikannya komponen belanja terbesar dibandingkan pos lainnya. Tren ini menggambarkan peningkatan kebutuhan operasional, program, serta kegiatan perencanaan pembangunan daerah.

3. Belanja Modal

Anggaran belanja modal relatif kecil dibanding dua pos lainnya. Terlihat ada kenaikan pada tahun 2022 hingga 2024 (mencapai hampir Rp1 miliar), namun kembali menurun pada 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi fisik atau pengadaan aset baru bukan menjadi prioritas utama dibanding belanja pegawai dan barang/jasa..

4. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan salah satu sumber daya strategis yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam era digital dan tata

kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government), keberadaan sistem informasi tidak lagi bersifat pelengkap, melainkan telah menjadi bagian integral dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, Bapperida Kabupaten telah memanfaatkan berbagai sistem informasi yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja. Sistem informasi ini menjadi tulang punggung dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta penguatan inovasi dan riset daerah.

Adapun sistem informasi yang digunakan di lingkungan Bapperida meliputi:

1. SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) (<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>)
Platform utama dari Kemendagri untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan secara elektronik dan terintegrasi.
2. IID (Indeks Inovasi Daerah)
([Indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id](https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id))
Sistem informasi dari Kemendagri untuk mendata dan menilai inovasi daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan 31dalah.
3. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
Digunakan untuk mengumumkan dan mengelola rencana pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan keterbukaan informasi 31dalah.
4. SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah)
(<https://simbada2025.baritoselatankab.go.id>)
Aplikasi untuk mengelola 31dala tetap milik daerah secara tertib dan akuntabel, mencakup pencatatan, pelaporan, dan inventarisasi barang milik daerah.
5. Sistem Informasi Pencatatan Persediaan
(<https://sipper.baritoselatankab.go.id/>) Sistem ini digunakan untuk mencatat keluar-masuknya barang habis pakai atau persediaan kantor (seperti ATK, bahan habis pakai, dan barang operasional lainnya). Sistem ini mendukung tertib administrasi dan pelaporan yang akurat atas nilai dan jumlah persediaan, serta menjadi bagian dari laporan keuangan instansi.

6. SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)
<https://srikandi-v2.arsip.go.id/login>
Digunakan untuk mengelola arsip surat dinamis, termasuk pengiriman dan penerimaan surat secara elektronik antarinstansi.
7. Absensi Digital
(<https://ekinerja.baritoselatankab.go.id/presensi/>)
Mendukung manajemen administrasi perkantoran, kepegawaian, dan pengarsipan digital dalam aktivitas harian.
8. Website Resmi Bapperida
(<https://bapperida.baritoselatankab.go.id>)
Berfungsi sebagai sarana informasi publik dan dokumentasi digital terhadap semua kegiatan, program, dan capaian BAPPERIDA.
9. SP4N-LAPOR (<https://www.lapor.go.id/>)
Platform nasional untuk menampung aspirasi, pengaduan, dan laporan dari masyarakat yang ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah, termasuk BAPPERIDA.
10. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
<https://ppid.baritoselatankab.go.id/>
Sistem informasi layanan publik untuk menjamin keterbukaan informasi bagi masyarakat sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.

Pemanfaatan sistem informasi tersebut telah mendorong Bapperida dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berbasis data. Selain itu, sistem ini juga memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaporan, serta mendukung transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dengan integrasi teknologi informasi, Bapperida terus bertransformasi menuju institusi perencana yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024.

1. Realisasi Program dan Kegiatan

Tabel. 2.8 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020-2024

2020		2021		2022		2023		2024	
PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI	PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI	PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI	PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI	PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.082.125.563	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.869.147.878	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.047.013.645	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.438.352.633
Belanja Pegawai	3.655.466.286	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.426.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.689.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.491.606	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.395.410
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.703.726.536	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.937.115.057	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.180.660.401	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.372.640.777	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.480.734.667
Gaji Pokok/Uang Representasi	2.146.025.900	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.811.270	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	64.633.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	91.081.380
Tunjangan Keluarga	192.231.352	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.301.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.197.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.386.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.164.487
Tunjangan Jabatan	193.569.672	Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.370.914	Administrasi Umum Perangkat Daerah	708.568.553	Administrasi Umum Perangkat Daerah	797.397.344	Administrasi Umum Perangkat Daerah	742.901.869
Tunjangan Fungsional Umum	63.915.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	242.268.450	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.265.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.710.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.160.750
Tunjangan Beras	103.705.440	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.822.642	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	332.879.734	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.115.192	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.962.760
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.250.398	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.020.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.076.920	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.638.426	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.951.310
Pembulatan Gaji	28.774	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	586.982.538	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	862.140.047	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	929.629.680	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.770.670.030
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	951.739.750	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	325.433.200	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	379.941.727	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	524.380.751	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	993.976.941

Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	951.739.750	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	20.304.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	161.783.400	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	103.700.904	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	129.190.681
BELANJA LANGSUNG	2.517.030.072	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	241.245.338	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	320.414.920	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	301.548.025	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	647.502.408
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	851.526.642	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.351.770.784	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.653.193.135	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.172.981.733	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.588.199.329
Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	5.265.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	319.473.850	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	517.494.944	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	754.215.278	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	845.082.066
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	166.468.300	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	633.585.900	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	519.626.100	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber daya Alam)	711.824.299	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber daya Alam)	735.379.570
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	73.554.100	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	398.711.034	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	616.072.091	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	706.942.156	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.007.737.693
Penyediaan Alat Tulis Kantor	42.015.200	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	32.229.600	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	30.143.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	495.829.366	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.112.616.589
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.048.750	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	32.229.600	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	30.143.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	15.987.964	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	200.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.448.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	32.229.600	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	30.143.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	14.538.736	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	300.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.610.000					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	16.630.648	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	300.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	17.090.000					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	448.672.018	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	312.616.659
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	59.600.000								
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	313.450.000								
Pertemuan Teknis dan Konsultasi Luar Daerah	85.969.292								
Pertemuan Teknis Dalam Daerah	58.008.000								

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	53.249.545								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.634.545								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12.915.000								
Pengadaan Komputer PC, Printer dan Laptop	13.000.000								
Pengadaan peralatan kantor	5.700.000								
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	46.634.300								
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	18.570.300								
Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah (Aksi PPK) Kab. Barito Selatan	3.150.000								
Pelaksanaan Aksi Daerah Hak Asasi Manusia	4.040.000								
Penyusunan RKA-DPA APBD dan DPA Perubahan	14.274.000								
Peningkatan Kinerja Keuangan dan Perencanaan	6.600.000								
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI	149.865.500								
Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	2.694.100								
Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	10.107.000								

36dalam3636at3636 ku Evaluasi Pembangunan	11.570.000								
36dalam3636at3636 ku Informasi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan	21.154.000								
Penyusunan Buku Laporan Bulanan Berdasarkan Kegiatan dan Feedback	17.774.300								
Rapat Pertemuan Teknis Dan Pengendalian (RAKOLDAL)	9.045.300								
36dalam3636at3636 ku Pencapaian Pembangunan Kab.Barito Selatan Tahun 2019	1.316.000								
Pertemuan Teknis dan peningkatan Kapasitas Tim Evaluasi dan Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)	16.610.000								
Pertemuan Teknis / Koordinasi / Konsultasi Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian	59.594.800								
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	10.232.500								
Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah	10.232.500								
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	248.400.856								
Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	87.577.556								
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPD)	7.009.100								
Forum Gabungan SKPD	60.241.800								
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIPPD	26.568.500								
Penyusunan KUA Dan PPAS APBD 2020	9.340.000								

Penyusunan KUPA Dan PPASP 2019	20.287.900								
Penyusunan Perubahan RKPD	20.612.100								
Penyusunan RKPD Tahun 2021	16.763.900								
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	173.539.121								
Sosialisasi, Desiminasi Perencanaan Program Bidang Ekonomi	28.693.821								
Asistensi Renja SKPD Bidang Ekonomi	4.000.000								
Konreg PDRB Kalimantan Tengah Dan Regional Kalimantan	1.000.000								
Pertemuan Teknis Pembangunan Pertanian, Lingkungan Hidup dan ESDM	25.399.900								
Pertemuan Teknis Pembangunan Perdagangan dan Koperasi, UMKM	14.710.000								
Pertemuan Teknis Pembangunan Penanaman Modal dan Pariwisata	14.579.600								
Pertemuan Teknis Pengendalian dan Perencanaan DAK bidang Perekonomian dan SDA	8.599.900								
Pertemuan Teknis dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah Bidang Ekonomi	49.025.900								
Pertemuan Teknis dan Peningkatan kapasitas Pengembangan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	27.530.000								
PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA WILAYAH	199.779.275								

Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	21.297.000								
Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	24.496.000								
Asistensi Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	6.690.000								
Pengendalian dan Perencanaan DAK bidang Infrastruktur	-								
Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Pengembangan Perumahan, Kawasan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.582.500								
Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Perencanaan dan Pengembangan Bidang Informasi, Komunikasi dan Perhubungan	49.746.000								
Verifikasi dan Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh	28.392.000								
Pertemuan Teknis dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	38.124.775								
Pertemuan Teknis Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur ke PUs	18.095.000								

Data Perencanaan Pembangunan Prasarana Komunikasi, Informasi dan Perhubungan	356.000								
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA	7.238.400								
Mengikuti Rapat Konsultasi, Pertemuan Teknis, Sinkronisasi Rencana Pembangunan Daerah Rawan Bencana	7.238.400								
PROGRAM PERENCANAAN KESRA, KEPEDUDUKAN DAN KEPERINTAHAN	187.459.933								
Verifikasi DAK Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan	11.616.000								
Asistensi Renja SKPD Bidang kesra, Kependudukan dan Pemerintahan	13.432.600								
Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Gender	500.000								
Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S)	33.636.100								
Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	9.860.000								
Rapat-Rapat Konsultasi, Pertemuan Teknis dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan	51.190.378								

Sosialisasi, Desiminasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kesra, kependudukan dan Pemerintahan	58.346.655								
Program Sustainable Development Goals (SDG's)	8.878.200								
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang	477.504.000								
Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	36.270.000								
Pengelolaan Pusat Data dan Informasi (PUSDINAL) Kabupaten Barito Selatan	91.275.000								
Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Barito Selatan	32.935.000								
Pengelolaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Daerah	49.587.000								
Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Sungai dan danau	39.937.000								
Penyusunan Dokumen Revisi PERDA RTRW Kab. Barsei	227.500.000								
Program Pemerintahan dan Nakertrans	146.799.800								
Pemutakhiran Data Rumah Ibadah dan Prasarana Pemerintahan Desa	13.779.800								
Pelaksanaan Perencanaan, Dokumentasi, Pendataan dan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan	12.740.600								

Analisis dan Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	8.679.400								
Penyusunan Program Kegiatan Bidang Pemerintahan	111.600.000								
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten	29.311.000								
Rencana Aksi (RA) Penanggulangan Kemiskinan Daerah	11.543.000								
Pertemuan Teknis Program Kemiskinan	17.768.000								
Program Perencanaan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	26.489.000								
Pemutakhiran Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	12.916.000								
Inventarisasi Sarana dan Prasarana Perpustakaan	13.573.000								
TOTAL ANGGARAN	6.172.496.358		7.053.108.485		10.921.554.242		9.645.454.424		11.909.838.581

2. Indikator Kinerja Utama

Periode 2020–2022 merupakan masa akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017–2022, sehingga seluruh target kinerja pada periode tersebut mengacu pada arah kebijakan, strategi, dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2017–2022. Mulai tahun 2023, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, pada instruksi kesatu poin (b) bahwa khusus kepada Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan poin (c) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 tersebut akan ditetapkan dengan Perkada, sehingga digunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026 sebagai dokumen pengganti RPJMD untuk menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan. Pergantian dokumen acuan ini berpengaruh terhadap indikator yang diukur, di mana beberapa indikator tidak lagi menjadi target pada tahun 2023–2024 karena menyesuaikan dengan mandat RPD. Berikut tabel target dan realisasi sebagai bentuk capaian kinerja Bappeda Kabupaten Barito Selatan tahun 2020 sampai 2024:

Tabel 2. 9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target dan Realisasi									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	-	-
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	-	-
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	-	-
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	-	-
5	Penjabaran Konsistensi Program	100%	93,07%	100%	81,39%	100	14,04%	-	-	-	-

	RPJMD kedalam RKP										
6	Nilai SAKIP	-	-	-	-	-	-	B	B	B	B
7	Opini BPK	-	-	-	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK	-	-	-	-	-	-	80	95,25	80	74,00
9	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKP)	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
10	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	-	-	-	-	-	-	INOVATIF	INOVATIF	INOVATIF	INOVATIF
11	Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3

Berikut penjelasan untuk tabel diatas :

- a. Tersedianya Dokumen RPJPD yang Ditetapkan dengan Perda

Pada periode 2020 hingga 2022, target ketersediaan dokumen RPJPD tercapai sesuai rencana, di mana dokumen telah tersedia dan ditetapkan melalui Perda setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan konsistensi pemenuhan kewajiban perencanaan jangka panjang daerah. Pada tahun 2023 dan 2024, indikator ini tidak menjadi target karena siklus RPJPD yang berlaku belum memerlukan penyusunan dokumen baru.
- b. Tersedianya Dokumen RPJMD yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada

Selama 2020–2022, target ketersediaan RPJMD tercapai penuh, sesuai dengan ketentuan penetapan melalui Perda/Perkada. Tidak ada deviasi antara target dan realisasi. Sama seperti RPJPD, indikator ini tidak diukur pada 2023 dan 2024 karena siklus penyusunan dokumen RPJMD sudah berjalan.
- c. Tersedianya Dokumen RKP
- d. Tersedianya Dokumen RTRW yang Ditetapkan dengan Perda
- e. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKP

sebesar 93,07%, pada 2021 capaian 81,39% dan 2022 capaian 14,04%. Hal ini mengindikasikan masih terdapat program RPJMD yang belum seluruhnya terakomodasi dalam RKPD karena ketidaksesuaian antara dokumen rencana strategis dan dokumen operasional tahunan, sehingga memerlukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah.

f. Nilai SAKIP

Penilaian SAKIP mulai muncul pada tahun 2023 dengan capaian nilai “B” dan tetap bertahan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah berada pada kategori baik, namun masih memiliki ruang peningkatan menuju kategori yang lebih tinggi.

g. Opini BPK

Sejak 2023 hingga 2024, Bapperida secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

h. Indeks Pencegahan Korupsi (MCP KPK)

Pada 2023, target indeks sebesar 80 terlampaui dengan realisasi 95,25. Namun pada 2024, capaian turun menjadi 74,00, berada di bawah target 80. Penurunan ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap langkah-langkah pencegahan korupsi yang telah dijalankan.

i. Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Daerah

Target 100% kesesuaian antar RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada 2023 dan 2024 tercapai penuh. Hal ini menunjukkan sinkronisasi dokumen perencanaan telah terjaga dengan baik.

j. Indeks Inovasi Daerah (IGA)

Sejak 2023 hingga 2024, Bapperida berada pada kategori “Inovatif” dalam penilaian IGA. Capaian ini mencerminkan adanya upaya pengembangan inovasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

k. Jumlah Kajian Kelitbangan yang Diimplementasikan

Target kajian kelitbangan pada 2023 adalah satu kajian yang diimplementasikan dan tercapai penuh. Pada 2024, target kembali

satu kajian namun realisasi mencapai tiga kajian yang berhasil diimplementasikan, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontribusi hasil litbang terhadap kebijakan pembangunan daerah.

4. Inovasi Layanan

Dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis, berbagai inovasi layanan publik telah diluncurkan selama lima tahun terakhir, seperti digitalisasi pelayanan melalui aplikasi online untuk perizinan, pengaduan masyarakat (SP4N-LAPOR, PPID), dan sistem informasi perencanaan (e-Planning), Sistem Informasi Geoportal Daerah (SIGERA) SIGERA dapat digunakan untuk mencari dan mengakses informasi geografi (data peta) dan pelayanan geografi (geographic services) Kabupaten Barito Selatan, peningkatan sinergi riset dan inovasi daerah, termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

5. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi strategisnya sebagai institusi perencana pembangunan daerah, BAPPERIDA menghadapi berbagai tantangan yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan ini mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pelayanan teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, serta kegiatan riset dan inovasi daerah. Berikut uraian tantangan utama yang dihadapi :

1. Dinamika Kebijakan dan Regulasi Nasional

BAPPERIDA harus selalu menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi yang terus berubah dan dinamis dari pemerintah Beberapa perubahan yang signifikan dalam lima tahun terakhir meliputi:

1. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform tunggal nasional untuk perencanaan dan penganggaran.
2. Perubahan metode evaluasi pembangunan dan pengukuran kinerja instansi pemerintah.
3. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pada masa pandemi COVID-19 yang mengganggu stabilitas program perencanaan.

Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan tinggi dan kemampuan adaptasi aparatur terhadap sistem dan ketentuan baru yang seringkali belum sepenuhnya siap secara teknis.

2. Ketersediaan dan Kualitas Data Pembangunan

Data menjadi elemen penting dalam perencanaan yang berbasis bukti (evidence-based planning), namun diantara tantangan yang dihadapi meliputi:

1. Ketersediaan data sektoral yang belum lengkap dan tidak terbarukan secara berkala.
2. Ketergantungan pada data dari perangkat daerah lain, yang terkadang belum menggunakan standar data yang seragam.
3. Minimnya pemanfaatan data spasial dan analisis geospasial untuk mendukung perencanaan wilayah dan tata ruang.

Keterbatasan ini berisiko menurunkan kualitas analisis dalam dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan tugas BAPPERIDA yang bersifat teknis dan membutuhkan keahlian khusus menghadapi tantangan SDM, seperti:

1. Jumlah SDM fungsional perencana dan peneliti yang masih terbatas, baik secara kuantitas maupun kompetensi.
2. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan kapasitas yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi setiap tahun.
3. Tingkat mutasi dan rotasi pegawai yang memengaruhi kesinambungan pelaksanaan program perencanaan dan litbang.

Hal ini berdampak pada keterbatasan institusi dalam menyusun dokumen strategis dan melaksanakan kegiatan riset yang mendalam.

4. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Efektivitas perencanaan pembangunan daerah sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa hal diantaranya adalah:

1. Kurangnya keterpaduan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah yang menyebabkan tumpang tindih atau ketidaksesuaian arah pembangunan.
2. Ketidaksesuaian prioritas daerah dengan usulan teknis OPD, sehingga menyulitkan proses penyelarasan dokumen perencanaan.

5. Tantangan Transformasi Digital dan Inovasi

Transformasi digital dan inovasi merupakan bagian penting dalam penguatan fungsi pelayanan BAPPERIDA, terutama dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari sisi internal organisasi maupun faktor eksternal yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun tantangan tersebut antara lain:

1. Literasi Digital Aparatur yang Belum Merata

Meskipun sistem informasi seperti SIPD, e-Planning, dan aplikasi lainnya telah mulai diterapkan, namun masih terdapat kesenjangan pemahaman dan kemampuan penggunaan teknologi digital di kalangan aparatur, terutama pada pegawai yang belum terbiasa menggunakan aplikasi berbasis digital secara aktif dan mandiri, kurangnya pelatihan teknis lanjutan yang berkelanjutan untuk peningkatan keterampilan digital ASN serta ketergantungan pada tenaga teknis tertentu yang menguasai sistem, sehingga jika terjadi mutasi, proses terganggu.

2. Infrastruktur dan Akses Teknologi yang Terbatas

Transformasi digital membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet stabil, perangkat kerja yang sesuai, serta sistem server dan penyimpanan data yang aman. Namun BAPPERIDA masih menghadapi:

- Keterbatasan jaringan internet, khususnya dalam koordinasi dengan perangkat daerah atau wilayah kecamatan yang aksesnya terbatas.
- Perangkat keras dan lunak yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional aplikasi berbasis digital.
- Minimnya 47 adalah pencadangan dan keamanan data, sehingga berisiko kehilangan atau kerusakan data penting.

3. Kurangnya Integrasi dan Interoperabilitas Sistem Informasi

Saat ini terdapat berbagai sistem informasi yang digunakan, baik yang dikembangkan pusat maupun daerah, namun belum sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya:

- Data dan informasi sering kali terfragmentasi dan tidak sinkron antar sistem, menyulitkan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.
- Proses perencanaan dan pelaporan menjadi duplikasi kerja, karena data harus diinput ke lebih dari satu sistem.
- Tidak adanya dashboard terintegrasi yang menampilkan kinerja lintas sektor secara real time.

4. Tantangan Budaya Kerja dan Perubahan Mindset

Transformasi digital dan inovasi memerlukan perubahan cara kerja dan pola pikir (mindset) aparatur. Namun, tantangan yang sering dihadapi antara lain:

- Masih adanya resistensi terhadap perubahan, terutama terhadap sistem kerja yang lebih terbuka, transparan, dan berbasis data.
- Budaya kerja birokratis yang lamban beradaptasi dengan teknologi.
- Inovasi sering dianggap sebagai tambahan beban kerja, bukan sebagai solusi untuk efisiensi.

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Barito Selatan memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bapperida melayani berbagai kelompok masyarakat, lembaga, dan pihak lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah identifikasi kelompok sasaran yang dilayani oleh Bapperida:

1. Sasaran Langsung
 - a. Perangkat Daerah
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Sasaran Tidak Langsung
 - a. Masyarakat umum
 - b. Dunia usaha dan Investor
 - c. Akademisi dan Lembaga Penelitian
 - d. Organisasi Masyarakat Sipil (LSM, Ormas, Komunitas)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Rendahnya kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu akar masalahnya adalah minimnya peran kajian dan penelitian dalam proses perencanaan, yang menyebabkan kebijakan dan program pembangunan kurang berbasis bukti ilmiah. Selain itu, sinkronisasi perencanaan pembangunan yang belum optimal antara berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor mengakibatkan ketidakefisienan dan tumpang tindih program. Kualitas sistem informasi data satu pintu yang rendah juga menjadi kendala, dimana data yang tersedia seringkali tidak akurat atau tidak terbaru yang menghambat pengambilan keputusan yang tepat. Di samping itu, sinkronisasi antara metadata dan capaian indikator data yang belum memadai menyebabkan kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan, sehingga perbaikan dan penyesuaian kebijakan tidak bisa dilakukan secara efektif.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, permasalahan yang dihadapi adalah kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penataan data base dan informasi perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik, dan kurang optimalnya koordinasi dengan instansi lingkup pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan instansi vertikal lainnya sebagai penyedia sumber data. Secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2. 10 Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Ketidaksinambungan antara perencanaan pembangunan 2. Lemahnya tata kelola sistem informasi pembangunan daerah	1. Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM perencana 2. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan dan tata ruang 3. Forum koordinasi seperti musrenbang, konsultasi publik atau rakor masih belum dijadikan ruang

		strategis dalam penyelarasan prioritas pembangunan 4. Rendahnya kualitas sistem informasi data satu pintu 5. Belum memadainya sinkronisasi antara metadata dan capaian indikator data 6. Kurang terintegrasinya sistem pendataan dari rumah data 7. Kurangnya pembaruan data secara berkala (<i>update</i> periodik tidak konsisten) 8. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan
Belum optimalnya Riset dan Inovasi dalam pembangunan daerah	1. Rendahnya integrasi riset dalam kebijakan pembangunan. 2. Inovasi daerah masih berfokus pada pemenuhan penilaian formal, sehingga kesinambungan dan kebermanfaatannya belum optimal.	1. Minimnya kerjasama untuk kajian pembangunan daerah 2. Rendahnya aksi tindak lanjut/implementasi teknis dari kajian/penelitian dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam menghasilkan kajian berbasis data dan bukti 4. Belum adanya mekanisme pembinaan dan monitoring keberlanjutan inovasi 5. Terbatasnya alokasi sumber daya (anggaran, SDM, dan sarana) untuk menjaga keberlanjutan inovasi.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. isu strategis perangkat daerah adalah permasalahan atau kondisi yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja dan pencapaian tujuan perangkat daerah di masa depan. Isu-isu ini perlu menjadi perhatian utama karena jika tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan masalah yang lebih besar atau sebaliknya, kehilangan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran umum perangkat daerah, permasalahan pelayanan, serta evaluasi internal dan eksternal, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Bapperida di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bapperida Kabupaten Barito Selatan pada periode 2025–2030 disajikan pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2. 11 Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN				ISU STRATEGIS
		ISU KLHS YANG RELEVAN	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Perencanaan Pembangunan Daerah	Rendahnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Masih rendahnya sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi di Barito Selatan	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintah daerah belum optimal	1. Penyelarasan Perencanaan Pembangunan 2. Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial
Riset dan Inovasi Daerah	Belum optimalnya Riset dan Inovasi dalam pembangunan daerah	Masih rendahnya sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi di Barito Selatan	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintah daerah belum optimal	1. Penguatan Ketahanan Energi dan EBT 2. Optimalisasi Integrasi riset dalam kebijakan pembangunan daerah 3. Peningkatan Inovasi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan atau memperhatikan sasaran RPJMD. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Adapun visi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara"

Visi tersebut menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kabupaten Barito Selatan dalam lima tahun mendatang. Penyusunan visi ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta menyelesaikan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan jangka menengah.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sejumlah misi sebagai arah pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang. Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

- Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil
- Misi 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Misi 3 : Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya
- Misi 4 : Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
- Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik
- Misi 6 : Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan

Dalam melaksanakan misi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya menjalankan 2 (dua) misi sebagai berikut:

2.2.2.1 Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

2.2.2.2 Misi 6 : Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Daerah yang Berkelanjutan

Untuk menjalankan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, Bapperida merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang jelas, terukur, serta selaras dengan visi pembangunan daerah. Tujuan menjadi arah yang ingin dicapai dan kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan atau memperhatikan sasaran RPJMD., sedangkan sasaran berfungsi sebagai indikator konkret dalam menilai capaian kinerja, sehingga pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, sasaran yang merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan misi Bapperida dalam periode Renstra 2025–2029 dapat disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan,Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya integritas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan Akuntable	Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Selatan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Indeks
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,10	3,20	3,50	3,70	3,90	4,00	Nilai
			Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	100,00	Nilai
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB	BB	Nilai
			Indeks Inovasi Daerah	Innovatif	Innovatif	Innovatif	Innovatif	Innovatif	Innovatif	Indeks/Nilai
		Mewujudkan ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Kabupaten Barito Selatan	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	71	73	75	77	79	81	Persentase

Dalam rangka menjamin keterukuran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, diperlukan penjelasan tentang metode perhitungan masing-masing indikator sasaran. Perumusan rumus perhitungan indikator tersebut bertujuan untuk memberikan standar baku dalam proses pengukuran, sehingga hasil yang diperoleh bersifat obyektif, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, indikator yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantau capaian kinerja, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Penyusunan rumus perhitungan indikator ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan, termasuk pedoman teknis dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun rumus perhitungan indikator sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Rumus perhitungan indikator sasaran

Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai hasil penilaian IPPN (skala 0-100) atau (sangat kurang – sangat baik)	Indeks	Bappenas
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai hasil penilaian maturitas SPIP oleh BPKP (skala 1 – 5)	Nilai	BPKP/Inspektorat
Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah	Nilai aspek perencanaan dalam MCP KPK	Nilai (0–100)	KPK (MCP Online)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat (skala AA–D)	Nilai	Inspektorat

Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	(Jumlah kebijakan berbasis data ÷ Total kebijakan) × 100	Persen (%)	Bapperida
Indeks Inovasi Daerah	Skor Indeks Inovasi Daerah yang diterbitkan oleh Mendagri.	Indeks/Nilai	Kemendagri

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rangkaian kerja dan fokus pembangunan Kabupaten Barito Selatan periode 2025–2029 merujuk pada RPJPD Barito Selatan Tahun 2025-2045. Tahap pembangunan jangka panjang tersebut terbagi ke dalam empat periode yang masing-masing memiliki periode lima tahun. Lebih lanjut, terdapat dua tahapan utama perencanaan RPJPD Barito Selatan 2025-2045, yakni Masyarakat Prasyarat Lepas Landas dan Lepas Landas. Tahapan ini kemudian dikontekstualisasikan pada empat periode pembangunan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang



RPJPD Kabupaten Barito Selatan pada periode satu (2025–2029) akan mengusung tema Transformasi Fondasi Pembangunan. Masing-masing tahun memiliki arah kebijakan masing-masing yang bermuara pada terwujudnya fondasi pembangunan. Pada tahun pertama, arah kebijakan akan berfokus pada pembangunan fondasi pada aspek SDM dan infrastruktur dasar. Hal ini penting sebab SDM dan infrastruktur dasar menjadi basis dalam pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Tahun kedua, inovasi dan hilirisasi industri adalah dua faktor yang menjadi sasaran. Dalam tahap ini, dilakukan kerjasama dengan pihak badan usaha untuk berinvestasi mengembangkan industri berkelanjutan di wilayah Kabupaten Selatan. Selain itu, akselerasi inovasi yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksi dengan cara menjalin kerjasama dengan mitra daerah. Di samping menjalin kerjasama, penyusunan peta jalan yang komprehensif serta reformasi regulasi juga patut menjadi perhatian.

Tahun pertama dan kedua menjadi kritikal dalam memastikan jalan awal dalam pembangunan pondasi telah terbangun, tahun ketiga dan tahun keempat percepatan dan penguatan pondasi melalui berbagai macam program pembangunan di sisi SDM, infrastruktur dasar, inovasi dan industri berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan regulasi dan pemaksimalan investasi menjadi kunci untuk mewujudkan fondasi pembangunan. Selain itu, bentuk kerjasama dalam proses pembangunan juga perlu dilaksanakan dengan melibatkan badan usaha, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat. Pada tahun terakhir fondasi pembangunan diharapkan telah tercapai. Tahun ini menjadi momentum bagi Kabupaten Barito Selatan melakukan evaluasi fondasi yang telah terbangun yang selanjutnya menyusun strategi optimilasisasi serta memperkuat fondasi. Uraian diatas disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan penahapan Renstra Perangkat Daerah dari tahun 2026 hingga 2030 sebagai gambaran prioritas pembangunan tahunan.

Tabel 3. 3 Penahapan Rencana Prioritas

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persiapan Fondasi SDM dan Infrastruktur Dasar	Penyusunan Fondasi dan Hilirisasi Industri yang Berkelanjutan	Percepatan Peletakan Fondasi Formasi	Pemantapan Fondasi Transformasi	Perwujudan Fondasi Transformasi

Tahapan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun secara bertahap setiap tahun dengan mempertimbangkan capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penahapan ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, sistematis, dan berkesinambungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga setiap tahun memiliki fokus prioritas yang saling mendukung dan berkontribusi pada pencapaian target akhir di tahun 2029.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bapperida Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bapperida yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra, adapun strategi dan arah kebijakan Bapperida dalam periode Renstra 2025–2029 yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah. disajikan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 4 Strategi dan arah kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Selatan	Optimalisasi pelaksanaan zonasi wilayah yang telah ditetapkan guna mempercepat pembangunan lintas sektor sesuai potensi kewilayahan	Optimalisasi sinergitas perencanaan yang terpadu dan partisipatif	Mengoptimalkan pelaksanaan zonasi wilayah yang telah ditetapkan guna mempercepat pembangunan lintas sektor sesuai potensi kewilayahan	
		Harmonisasi pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.		Meningkatkan sinergi dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	
		Penguatan mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja pemerintahan		Memperkuat mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja pemerintahan	

		Peningkatan upaya pentahelix melalui pelibatan masyarakat adat dan umum dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.		Meningkatkan upaya pentahelix melalui pelibatan masyarakat adat dan umum dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	
		Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan wilayah administratif pemerintahan yang adaptif terhadap kondisi geografis, beban kerja kewilayahan, dan dinamika kependudukan.		Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan wilayah administratif pemerintahan yang adaptif terhadap kondisi geografis, beban kerja kewilayahan, dan dinamika kependudukan.	
		Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif.	Penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaptif	Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif.	
		Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan bebas dari tindakan korupsi.		Menguatkan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional	

				dan bebas dari tindakan korupsi.	
		Penguatan struktur kelembagaan dan penempatan aparatur daerah secara tepat fungsi dan tepat kompetensi guna mendorong kinerja organisasi yang efektif.		Menguatkan struktur kelembagaan dan penempatan aparatur daerah secara tepat fungsi dan tepat kompetensi guna mendorong kinerja organisasi yang efektif.	
2	Mewujudkan ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Kabupaten Barito Selatan	Penyusunan kajian dan perencanaan komprehensif potensi sumber daya EBT (Surya, angin, biomassa, dan hidro) meliputi kelayakan teknis, jadwal, pembiayaan, serta manajemen risiko.	Mengembangkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) secara optimal	Melaksanakan kajian teknis dan penyusunan perencanaan energi baru terbarukan (EBT) yang mencakup identifikasi potensi (surya, angin, biomassa, dan hidro), analisis kelayakan teknis, penyusunan jadwal implementasi, estimasi kebutuhan pembiayaan, serta strategi manajemen risiko.	
		Kolaborasi dengan akademisi dan LSM untuk penelitian, pengembangan, dan edukasi masyarakat mengenai energi terbarukan.		Mengembangkan kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam rangka mendukung kegiatan penelitian, pengembangan	

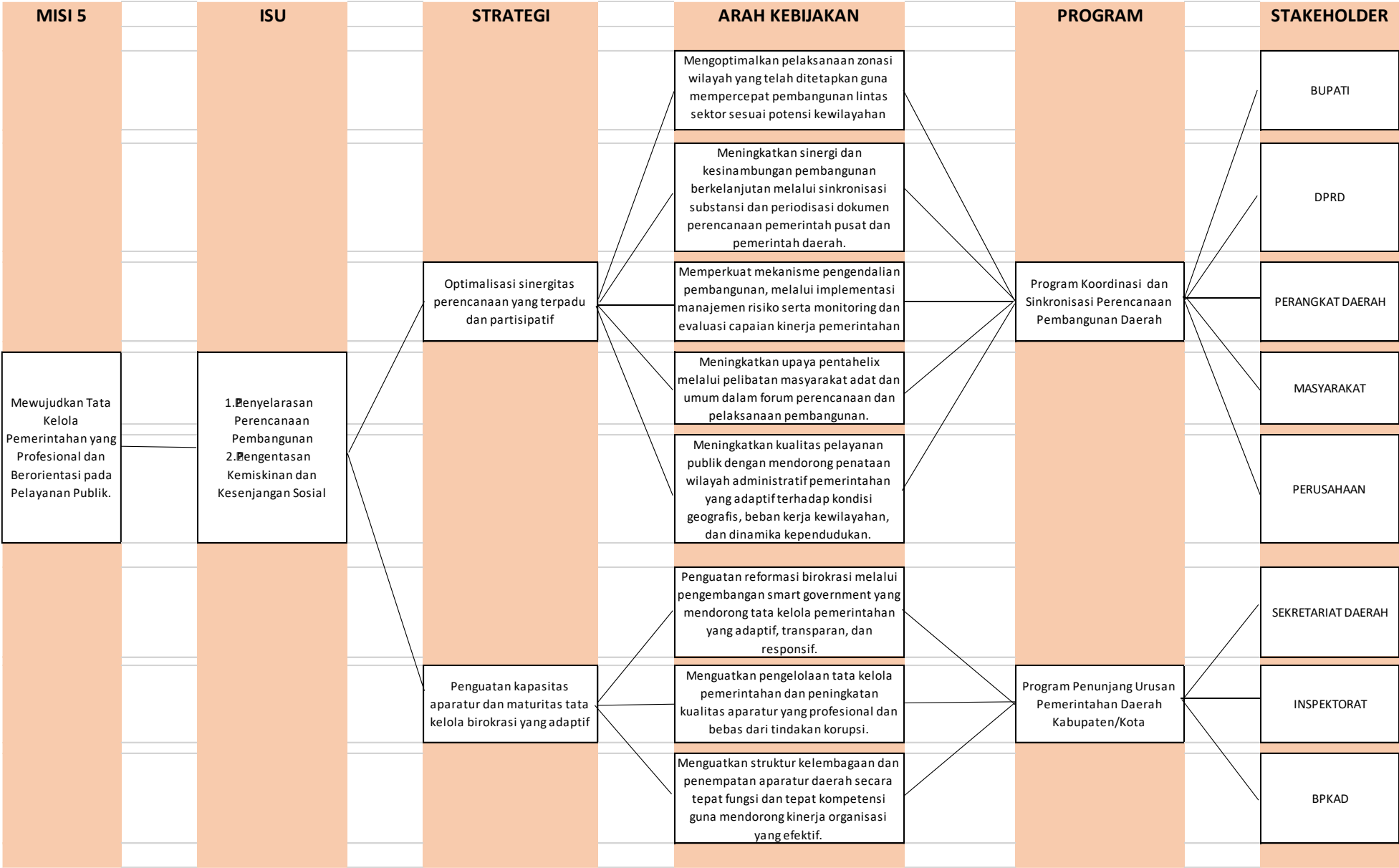
				inovasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi terkait pemanfaatan energi terbarukan.	
--	--	--	--	--	--

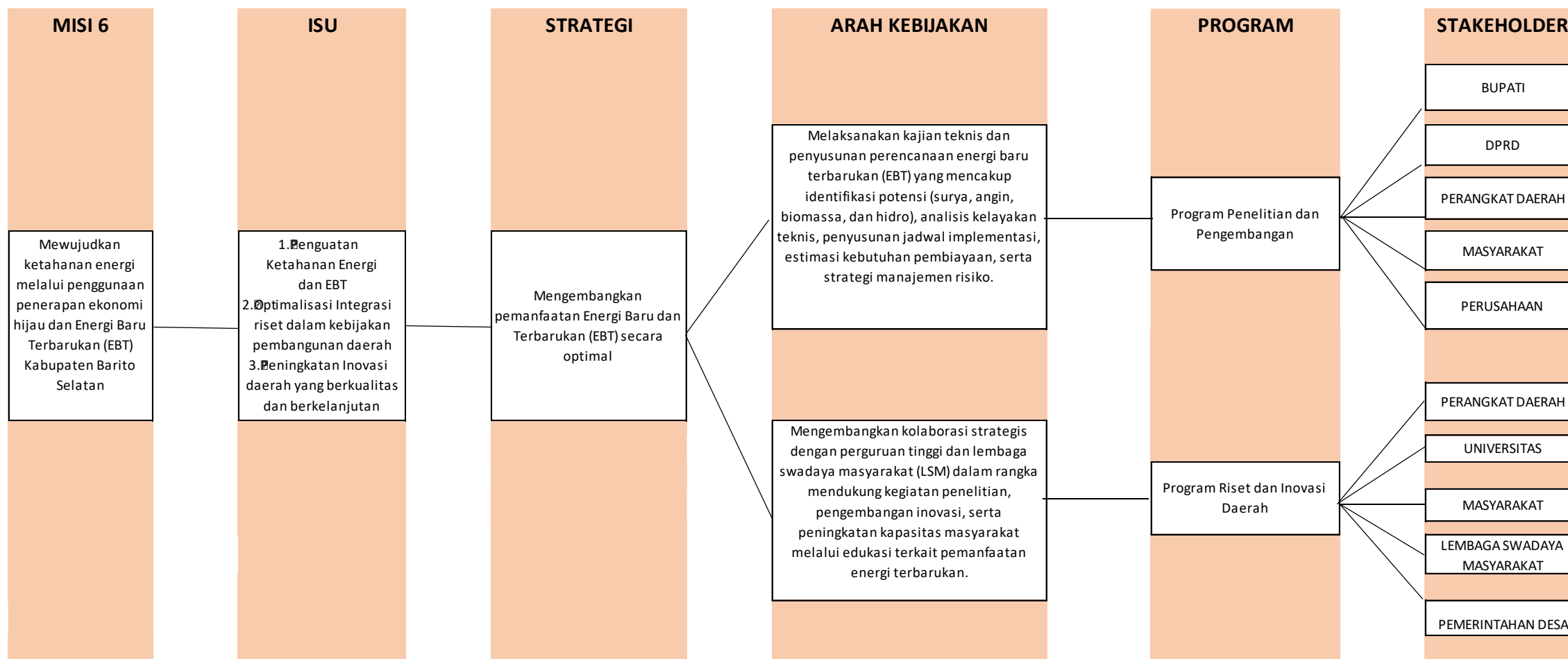
Tabel 3.4 di atas menggambarkan keterkaitan arah kebijakan RPJMD dengan strategi dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah. Pada fokus peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan diarahkan pada optimalisasi zonasi wilayah, harmonisasi pembangunan berkelanjutan, penguatan mekanisme pengendalian, pelibatan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, pada fokus mewujudkan ketahanan energi melalui penerapan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan, kebijakan menekankan penyusunan kajian teknis potensi EBT serta kolaborasi dengan akademisi dan LSM untuk mendukung penelitian, pengembangan, dan edukasi masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah mampu menurunkan RPJMD ke dalam implementasi teknis yang lebih operasional dan terukur.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Bapperida memiliki peran strategis sebagai koordinator perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta pengembangan riset dan inovasi daerah. Dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah melalui mekanisme crosscutting program dan kegiatan. Crosscutting ini menggambarkan hubungan fungsional antara Bapperida dengan perangkat daerah lain dalam pelaksanaan strategi dan arah kebijakan, sehingga terwujud keselarasan dokumen perencanaan, pemanfaatan data dan kajian berbasis bukti, serta penguatan inovasi daerah. Dengan adanya pola keterkaitan lintas sektor, diharapkan setiap perangkat daerah dapat berkontribusi sesuai tugas dan kewenangannya, sementara Bapperida berperan sebagai pengarah, penghubung, sekaligus pengendali agar pembangunan daerah berjalan lebih terarah, konsisten, dan berkelanjutan.

Adapun crosscutting Bapperida dengan perangkat daerah lain disajikan pada gambar 3.2 berikut:

Gambar 3. 2 Gambar Crosscutting BAPPERIDA





BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program;

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bappeda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah dioperasionisasikan melalui Program Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang diturunkan dalam kegiatan dan subkegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan program dilakukan berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yang dirumuskan melalui pendekatan cascading berbasis outcome. Setiap program dipilih secara selektif guna optimalisasi kerangka alokasi anggaran belanja daerah sesuai dengan kapasitas fiskal. Program Perangkat Daerah dibagi berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah adalah pada unsur penunjang urusan pemerintahan yaitu :

- a. Unsur Perencanaan
- b. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Tabel 4. 1 Program Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01 - PERENCANAAN					10.488.244.272		10.488.244.272		10.488.244.272		10.488.244.272		10.488.244.272
5.01.01 – PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.310.244.972		7.310.244.972		7.310.244.972		7.310.244.972		7.310.244.972
Terlaksananya Pelayanan Publik Yang Lebih Baik Melalui Dukungan Fasilitasi, Teknologi Informasi, Dan Sumber Daya Manusia Yang Professional.	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana (%)	98	100	100	7.310.244.972	100	7.310.244.972	100	7.310.244.972	100	7.310.244.972	100	7.310.244.972
5.01.02 – PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					10.488.244.272		10.488.244.272		10.488.244.272		10.488.244.272		10.488.244.272
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (%)	99	100	100	1.297.679.000	100	1.297.679.000	100	1.297.679.000	100	1.297.679.000	10	1.297.679.000
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RENSTRA Perangkat Daerah (%)	99	100	100		100		100		100		10	
5.01.03– PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.876.320.500		1.876.320.500		1.876.320.500		1.876.320.500		1.876.320.500

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia(%)	100	100	100	1.876.320.500	100	1.876.320.500	100	1.876.320.500	100	1.876.320.500	10	1.876.320.500
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100		100		100		100		10	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100		100		100		100		10	
5.05 – PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					3.583.122.294		8.369.746.005		7.650.935.759		8.124.632.109		10.246.033.263
5.05.02 PROOGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					2.648.122.294		2.648.122.294		2.648.122.294		2.648.122.294		2.648.122.294
Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Potensi Unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Pengembangan Potensi Unggulan Yang Termanfaatkan Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	2.648.122.294	100	2.648.122.294	100	2.648.122.294	100	2.648.122.294	100	2.648.122.294
Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis Dan Supervise Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian Dan Penerapan Di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan,Bimbingan Teknis Dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian Dan Penerapan Di Daerah(%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan(%)	100	100	100		100		100		100		100	
5.05.03 PROOGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					935.000.000		5.721.623.711		5.721.623.711		5.476.509.815		7.597.910.969
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan.	0	0,51	0,51	935.000.000	1	5.721.623.711	1	5.002.813.465	1	5.476.509.815	1	7.597.910.969

4.2 Uraian Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, Bapperida menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan, koordinasi, inovasi, dan pemantauan pembangunan. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat integrasi perencanaan antar perangkat daerah, mendorong lahirnya invensi dan inovasi, serta memastikan setiap program dan kebijakan yang dijalankan memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan manusia dan pemerintahan yang efektif.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Bapperida menyelenggarakan kegiatan yang terstruktur melalui 5 (lima) program yaitu

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
- b. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- c. Program Sinkronisasi Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Program Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- e. Program Riset dan Inovasi Daerah

Setiap program dirancang untuk menjawab kebutuhan strategis pembangunan dan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, koordinasi, inovasi, dan evaluasi. Keempat program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 22 kegiatan operasional, yang mencakup seluruh aspek perencanaan, pengembangan kapasitas, inovasi, koordinasi antar perangkat daerah, dan pemantauan serta evaluasi pembangunan. Dengan struktur program dan kegiatan ini, Bapperida bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan daerah.
2. Mendorong terciptanya inovasi dan invensi yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Memastikan integrasi perencanaan dan sinkronisasi antar perangkat daerah.
4. Menjamin pelaksanaan program pembangunan sesuai target dan indikator kinerja yang ditetapkan.

Struktur 5 (lima) program dan 22 kegiatan ini juga memudahkan pemantauan capaian, evaluasi kinerja, dan penetapan langkah strategis yang diperlukan untuk peningkatan kualitas pembangunan di setiap periode Renstra, adapun uraian kegiatan disajikan pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4. 2 Program, Kegiatan, Target dan Pagu Indikatif 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.01 - PERENCANAAN				10.484.244.472		10.484.244.472		10.484.244.472		10.479.844.472		10.484.244.472
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)	98	100	7.310.244.972	100	7.310.244.972	100	7.310.244.972	100	7.310.244.972	100	7.310.244.972
Terlaksananya pelayanan publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang profesional.												
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	252.089.100	100	252.089.100	100	252.089.100	100	252.089.100	100	252.089.100
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi keuangan	100	100	5.528.985.272	100	5.528.985.272	100	5.528.985.272	100	5.528.985.272	100	5.528.985.272
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian pengelolaan administrasi barang milik daerah	100	100	25.904.100	100	25.904.100	100	25.904.100	100	25.904.100	100	25.904.100
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	96.210.000	100	96.210.000	100	96.210.000	100	96.210.000	100	96.210.000
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum PD	100	100	552.859.000	100	552.859.000	100	552.859.000	100	552.859.000	100	552.859.000
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	87.630.000	100	87.630.000	100	87.630.000	100	87.630.000	100	87.630.000
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	478.915.000	100	478.915.000	100	478.915.000	100	478.915.000	100	478.915.000

5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100	100	287.652.500	100	287.652.500	100	287.652.500	100	287.652.500	100	287.652.500
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%) Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (%)	99	100	1.297.679.000	100	1.297.679.000	100	1.297.679.000	100	1.297.679.000	100	1.297.679.000
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah												
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan	100	100	995.384.000	100	995.384.000	100	995.384.000	100	995.384.000	100	995.384.000
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen untuk Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	91.692.000	100	91.692.000	100	91.692.000	100	91.692.000	100	91.692.000
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan PD untuk Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan target	100	100	210.603.000	100	210.603.000	100	210.603.000	100	210.603.000	100	210.603.000
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase implementasi sistem informasi Pemerintahan Daerah	-	-	-		-		-		-		-
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.876.320.500		1.876.320.500		1.876.320.500		1.871.920.500		1.876.320.500

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100		100		100		100		100	
		100	100		100		100		100		100	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)											
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (tercapai >80% target kegiatan).	100	100	831.115.000	100	831.115.000	100	831.115.000	100	831.115.000	100	831.115.000
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (tercapai >80% target kegiatan).	100	100	420.451.500	100	420.451.500	100	420.451.500	100	420.451.500	100	420.451.500
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (tercapai >80% target kegiatan).	100	100	624.754.000	100	624.754.000	100	624.754.000	100	620.354.000	100	624.754.000
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.583.122.294		3.583.122.294		3.583.122.294		3.583.122.294		3.583.122.294
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		100	100	2.648.122.294		2.648.122.294		2.648.122.294		2.648.122.294		2.648.122.294

Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)	100	100		100		100		100		100	
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang difasilitasi	-	-		-		-		-		-	
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang difasilitasi	100	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi	100	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi Yang difasilitasi dalam pengembangannya	100	100	698.122.294	100	698.122.294	100	698.122.294	100	698.122.294	100	698.122.294
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		100	100	935.000.000		935.000.000		935.000.000		935.000.000		935.000.000
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	-	0,51		0,51		0,51		0,51		0,51	

5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	Persentase inovasi/inovasi yang terverifikasi	-	100	695.000.000	100	695.000.000	100	695.000.000	100	695.000.000	100	695.000.000

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BAPPERIDA Tahun 2025–2029, diperlukan langkah operasional yang lebih konkret melalui perumusan kegiatan dan subkegiatan yang dilengkapi dengan ukuran kinerja yang jelas. Subkegiatan merupakan bagian terkecil dari proses perencanaan yang secara langsung mendukung pencapaian kegiatan, program, hingga sasaran strategis perangkat daerah. Oleh karena itu, setiap subkegiatan yang disusun harus memiliki relevansi langsung dengan mandat, fungsi, serta kontribusi BAPPERIDA terhadap pembangunan daerah. Penting untuk dipahami bahwa subkegiatan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan program, tetapi juga sebagai tolok ukur akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tercermin dari adanya indikator, target capaian, dan pagu indikatif yang melekat pada setiap subkegiatan. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan subkegiatan, sementara target capaian memberikan arah yang jelas mengenai tingkat hasil yang diharapkan dalam periode tertentu. Pagu indikatif yang dialokasikan menjadi batas sumber daya keuangan yang tersedia, sehingga pelaksanaan subkegiatan dapat dilakukan secara realistis, efisien, dan efektif.

Selain itu, penyusunan uraian subkegiatan beserta indikator dan targetnya juga dimaksudkan untuk menjaga konsistensi perencanaan dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara perencanaan strategis lima tahunan dengan perencanaan tahunan, serta keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip money follow program, dimana alokasi anggaran diarahkan pada program dan subkegiatan yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan.

Lebih jauh lagi, keterkaitan antara subkegiatan, indikator, target, dan pagu indikatif menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Dengan informasi yang lengkap dan terukur, proses pengendalian, pemantauan, serta evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih objektif. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya. Dengan demikian, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif yang disajikan berikut ini bukan hanya sekadar daftar kegiatan, tetapi merupakan instrumen manajerial yang menunjukkan arah pelaksanaan pembangunan daerah secara konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	K E T
Meningkatnya integritas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan Akuntable	Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Selatan	Terlaksananya pelayanan publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang profesional.		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase capaian kinerja penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah	
					Persentase capaian kinerja administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
					Persentase capaian pengelolaan administrasi barang milik daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Persentase capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum PD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	

				n Bangunan Kantor		ngan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	

				Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%) Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (%)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
					Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
				Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Dokumen untuk Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Laporan PD untuk Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan target	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Persentase implementasi sistem informasi Pemerintahan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	

				Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah (Dokumen)	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah	
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)		
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)		
					Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (tercapai >80% target kegiatan).	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	Asistensi Penyusunan	

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (tercapai >80% target kegiatan).	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	

					Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (tercapai >80% target kegiatan).	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
Mewujudkan ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT)		Mewujudkan ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Kabupaten Barito Selatan			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%) Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)	Program Penelitian Dan Pengembangan n Daerah	

					Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)		
					Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang difasilitasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang difasilitasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	
					Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	

				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
					Persentase Inovasi dan Teknologi Yang difasilitasi dalam pengembangannya	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
				Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
				Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan (Laporan)	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
					Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset Dan Inovasi Daerah	
					Persentase Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
				Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	

				Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
					Persentase invensi/inovasi yang terverifikasi	Invensi dan Inovasi	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	

				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	
				Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
				Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan	

				Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pusat dan Pemerintah Daerah (Laporan)	antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	
				Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	
				Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi (Naskah)	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
				Terseleenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan)	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset (Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	

Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01 - PERENCANAAN				10.534.244.472		14.607.149.991		13.036.191.101		13.280.514.892		14.224.694.251	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)			7.510.244.972		8.510.454.872		7.310.244.972		7.310.244.972		7.310.244.972	
Terlaksananya pelayanan publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang profesional.		98	100	7.510.244.972	100	8.510.454.872	100	7.310.244.972	100	7.310.244.972	100	7.310.244.972	
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	252.089.100	100	252.089.100	100	252.089.100	100	252.089.100	100	252.089.100	
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	33.606.100	1	33.606.100	1	33.606.100	1	33.606.100	1	33.606.100	
5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	28.276.000	1	28.276.000	1	28.276.000	1	28.276.000	1	28.276.000	

5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	27.065.000	1	27.065.000	1	27.065.000	1	27.065.000	1	27.065.000	
5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	17.871.000	1	17.871.000	1	17.871.000	1	17.871.000	1	17.871.000	
5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	17.871.000	1	17.871.000	1	17.871.000	1	17.871.000	1	17.871.000	
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	26.281.000	2	26.281.000	2	26.281.000	2	26.281.000	2	26.281.000	
5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	66.119.000	2	66.119.000	2	66.119.000	2	66.119.000	2	66.119.000	
5.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
5.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	0	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi keuangan			5.528.985.272		6.135.395.772		5.528.985.272		5.528.985.272		5.528.985.272	
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	45	5.220.663.272	45	5.720.663.272	45	5.220.663.272	45	5.220.663.272	45	5.220.663.272	
5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	2	254.732.500	2	294.732.500	2	254.732.500	2	254.732.500	2	254.732.500	

5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	14.927.000	1	20.000.000	1	14.927.000	1	14.927.000	1	14.927.000	
5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	12.955.000	1	25.000.000	1	12.955.000	1	12.955.000	1	12.955.000	
5.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	8.363.500	2	25.000.000	2	8.363.500	2	8.363.500	2	8.363.500	
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	12.344.000	18	25.000.000	18	12.344.000	18	12.344.000	18	12.344.000	
5.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	2	5.000.000	2	25.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian pengelolaan administrasi barang milik daerah			25.904.100		45.000.000		25.904.100		25.904.100		25.904.100	
5.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	6.977.500	1	15.000.000	1	6.977.500	1	6.977.500	1	6.977.500	
5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	18.926.600	1	30.000.000	1	18.926.600	1	18.926.600	1	18.926.600	
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah			296.210.000		395.000.000		96.210.000		96.210.000		96.210.000	
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	8.200.000	1	50.000.000	1	8.200.000	1	8.200.000	1	8.200.000	
5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4	11.350.000	4	30.000.000	4	11.350.000	4	11.350.000	4	11.350.000	
5.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
5.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	35	26.660.000	35	35.000.000	35	26.660.000	35	26.660.000	35	26.660.000	
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	45	230.000.000	45	250.000.000	45	30.000.000	45	30.000.000	45	30.000.000	
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum PD			552.859.000		835.000.000		552.859.000		552.859.000		552.859.000	
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	35.562.000	1	50.000.000	1	35.562.000	1	35.562.000	1	35.562.000	
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	31.737.500	1	50.000.000	1	31.737.500	1	31.737.500	1	31.737.500	
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	16.448.000	1	30.000.000	1	16.448.000	1	16.448.000	1	16.448.000	
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	15.000.000	1	30.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	16.773.000	1	25.000.000	1	16.773.000	1	16.773.000	1	16.773.000	
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu													
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	24	24	18.150.000	24	25.000.000	24	18.150.000	24	18.150.000	24	18.150.000	
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	75	75	410.216.000	75	600.000.000	75	410.216.000	75	410.216.000	75	410.216.000	
5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	8.972.500	1	25.000.000	1	8.972.500	1	8.972.500	1	8.972.500	
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			87.630.000		115.000.000		87.630.000		87.630.000		87.630.000	
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel													

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	4	15.000.000	4	40.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	18	72.630.000	18	75.000.000	18	72.630.000	18	72.630.000	18	72.630.000	
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			478.915.000		420.000.000		478.915.000		478.915.000		478.915.000	
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	7.200.000	12	10.000.000	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	11	11	184.515.000	11	200.000.000	11	184.515.000	11	184.515.000	11	184.515.000	
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	38.200.000	12	60.000.000	12	38.200.000	12	38.200.000	12	38.200.000	
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	249.000.000	12	150.000.000	12	249.000.000	12	249.000.000	12	249.000.000	
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara			287.652.500		312.970.000		287.652.500		287.652.500		287.652.500	
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	47.970.000	1	47.970.000	1	47.970.000	1	47.970.000	1	47.970.000	
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	83	83	14.200.000	83	15.000.000	83	14.200.000	83	14.200.000	83	14.200.000	
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	177.792.500	1	200.000.000	1	177.792.500	1	177.792.500	1	177.792.500	

5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	32.690.000	1	35.000.000	1	32.690.000	1	32.690.000	1	32.690.000	
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%) Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (%)			1.247.679.000		2.127.420.256		1.998.048.704		2.083.304.629		2.315.114.657	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		99	100		100		100		100		10		
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan			866.644.000		1.322.420.256		1.193.048.704		1.278.304.629		1.450.114.657	
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah													
Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		1	15.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya													
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		1	15.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik													
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	1	45.190.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	2	85.000.000	

5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah													
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	3	3	33.939.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota													
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	3	38.305.000	3	125.000.000	3	125.000.000	3	125.000.000	3	125.000.000	
5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan													
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	30	36	61.260.000	36	150.000.000	36	150.000.000	36	150.000.000	36	150.000.000	
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	2	657.950.000	2	802.420.256	2	673.048.704	2	758.304.629	3	890.114.657	
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen untuk Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah			140.432.000		215.000.000		215.000.000		215.000.000		215.000.000	
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	61.836.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	

5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah													
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	35	35	64.500.000	35	75.000.000	35	75.000.000	35	75.000.000	35	75.000.000	
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	1	14.096.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan PD untuk Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan target			210.603.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota													
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	1	82.627.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	
5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah													
Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	1		1		1		1		1		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													

Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	1	1	127.976.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase implementasi sistem informasi Pemerintahan Daerah			30.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		150.000.000	
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah													
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	
5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah													
Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah													
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.776.320.500		3.969.274.863		3.727.897.425		3.886.965.291		4.599.334.622	

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100		100		100		100		10		
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100		100		100		100		10		
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100		100		100		100		10		
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (tercapai >80% target kegiatan).			806.115.000		1.727.805.683		1.622.735.280		1.691.976.734		2.002.067.575	
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	7	7	55.280.000	7	197.280.000	7	187.280.000	7	187.280.000	7	207.280.000	
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													

Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	7	7	38.350.000	7	172.350.000	7	152.000.000	7	152.000.000	7	190.750.000	
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	7	7	34.649.000	7	185.649.000	7	165.000.000	7	165.000.000	7	194.750.000	
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	7	7	43.913.000	7	177.913.000	7	155.913.000	7	155.913.000	7	194.663.000	
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	10	10	201.520.000	10	251.520.000	10	239.520.000	10	239.520.000	10	270.270.000	

5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	10	10	116.378.000	10	216.378.000	10	211.378.000	10	211.378.000	10	270.128.000	
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	10	10	93.450.000	10	203.450.000	10	198.450.000	10	247.691.454	10	277.691.454	
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	10	10	222.575.000	10	323.265.683	10	313.194.280	10	333.194.280	10	396.535.121	
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (tercapai >80% target kegiatan).			395.451.500		903.760.829		848.801.805		885.019.832		1.047.218.601	

Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)													
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	9	145.816.000	9	429.241.329	9	439.932.000	9	440.932.000	9	550.000.000	
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	6	9	3.500.000	9	8.000.000	9	7.500.000	9	10.000.000	9	15.218.601	
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	6	9	25.000.000	9	35.984.000	9	32.000.000	9	35.576.332	9	40.500.000	
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	2	9	63.838.000	9	86.838.000	9	73.672.305	9	75.000.000	9	80.000.000	

5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	3	126.522.000	3	285.522.000	3	260.522.000	3	275.522.000	3	296.500.000	
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	3	3	4.589.500	3	10.989.500	3	7.989.500	3	9.989.500	3	15.000.000	
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	3	3	10.966.000	3	21.966.000	3	15.966.000	3	18.000.000	3	25.000.000	
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA													
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	3	15.220.000	3	25.220.000	3	11.220.000	3	20.000.000	3	25.000.000	

5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (tercapai >80% target kegiatan).			574.754.000		1.337.708.351		1.256.360.340		1.309.968.725		1.550.048.446	
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	4	62.830.000	4	212.830.000	4	212.830.000	4	212.830.000	4	212.830.000	
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	4.400.000	4	20.400.000	4	20.400.000	4	20.400.000	4	20.400.000	
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	111.413.000	4	211.413.000	4	211.413.000	4	211.413.000	4	211.413.000	
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													

Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	290.651.000	4	490.651.000	4	490.651.000	4	490.651.000	4	590.651.000	
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6	6	36.000.000	6	56.000.000	6	56.000.000	6	56.000.000	6	56.000.000	
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	6	6	4.530.000	6	20.530.000	6	20.530.000	6	20.530.000	6	20.530.000	
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	6	6	35.859.000	6	100.859.000	6	100.859.000	6	100.859.000	6	150.859.000	
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													

Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	6	6	29.071.000	6	225.025.351	6	143.677.340	6	197.285.725	6	287.365.446	
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.533.122.294		7.053.783.000		6.646.536.315		6.930.141.314		8.200.237.590	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				3.251.622.294		6.772.283.000		6.365.036.315		6.646.536.315		7.916.632.591	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)												
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang difasilitasi			0		0		0		0		0	

5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang difasilitasi			893.075.000		2.538.000.000		2.438.000.000		2.538.000.000		3.428.000.000	
5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)		1	162.387.000,00	1	258.000.000,00	1	208.000.000,00	1	258.000.000,00	1	308.000.000,00	
5.05.02.2.02.0002 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)				1	208.000.000,00	1	208.000.000,00	1	208.000.000,00	1	308.000.000,00	
5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)		1	161.387.000	1	208.000.000	1	208.000.000,00	1	208.000.000,00	1	308.000.000,00	
5.05.02.2.02.0004 - Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)		1		1	208.000.000	1	208.000.000,00	1	208.000.000,00	1	308.000.000,00	
5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)		1	160.387.000	1	258.000.000	1	208.000.000,00	1	258.000.000,00	1	358.000.000,00	

5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)		1	203.387.000	1	258.000.000	1	258.000.000,00	1	258.000.000,00	1	308.000.000,00	
5.05.02.2.02.0007 - Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)		1	205.527.000	1	208.000.000	1	208.000.000,00	1	208.000.000,00	1	310.500.000,00	
5.05.02.2.02.0008 - Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)				1	208.000.000,00		208.000.000,00	1	208.000.000,00	1	310.500.000,00	
5.05.02.2.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)		1	0	1	208.000.000,00		208.000.000,00	1	208.000.000,00	1	258.000.000,00	
5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)		1	0	1	258.000.000,00		258.000.000,00	1	258.000.000,00	1	373.000.000,00	
5.05.02.2.02.0011 - Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi													

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)				1	258.000.000,00		258.000.000,00	1	258.000.000,00		278.000.000,00	
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi			1.414.812.444		3.304.000.000		3.124.000.000		3.304.000.000		3.324.000.000	
5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)		1	205.441.444	1	258.000.000	1	258.000.000,00	1	258.000.000,00	1	278.000.000,00	
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)		1	161.887.000	1	258.000.000	1	258.000.000,00	1	258.000.000,00	1	258.000.000,00	
5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)				1	258.000.000		258.000.000,00	1	258.000.000,00		258.000.000,00	
5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)		1	203.887.000	1	258.000.000	1	258.000.000,00	1	258.000.000,00	1	258.000.000,00	

5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)		1	203.921.000	1	258.000.000	1	258.000.000,00	1	258.000.000,00	1	258.000.000,00	
5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)		1	159.887.000	1	258.000.000		258.000.000,00	1	258.000.000,00		258.000.000,00	
5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)				1	258.000.000	1	258.000.000,00	1	258.000.000,00	1	258.000.000,00	
5.05.02.2.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)		1	160.015.000	1	258.000.000	1	208.000.000,00	1	258.000.000,00	1	258.000.000,00	
5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)		1	159.387.000	1	258.000.000	1	258.000.000,00	1	258.000.000,00	1	258.000.000,00	
5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)		1	0	1	258.000.000		208.000.000,00		258.000.000,00		258.000.000,00	

5.05.02.2.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)		1	160.387.000	1	258.000.000	1	258.000.000,00	1	258.000.000,00	1	258.000.000,00	
5.05.02.2.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)		1	0	1	258.000.000		208.000.000,00		258.000.000,00		258.000.000,00	
5.05.02.2.03.0013 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika													
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)		1	0	1	208.000.000		178.000.000,00		208.000.000,00		208.000.000,00	
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi Yang difasilitasi dalam pengembangannya			943.734.850		930.283.000		803.036.315		804.536.315		1.164.632.591	
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi													
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)		1	340.000.000	1	258.000.000	1	195.623.315	1	195.623.315,00	1	555.719.591,00	

5.05.02.2.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi													
Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)		1	82.871.000	1	131.371.000	1	53.563.000	1	53.563.000	1	53.563.000,00	
5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif													
Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)		1	163.500.000	1	187.008.000	1	203.550.000	1	203.550.000	1	203.550.000,00	
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan													
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)		1	167.362.850	1	159.150.000	1	160.500.000	1	160.500.000	1	160.500.000,00	
5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual													
Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)		1	190.001.000	1	194.754.000	1	189.800.000	1	191.300.000	1	191.300.000,00	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				281.500.000		281.500.000		281.500.000		283.604.999		283.604.999	

Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	-	0,51		0,51		0,51		0,51		0,51		
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			-		-		-		-		-	
5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan													
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1		1		1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset													
Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	0	1		1		1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan													
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1		1		1	0	1	0	1		
5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan													

Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1		1		1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.01.0005 - Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan													
Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	0	1		1		1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah													
Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	0	1		0	1	1	0	1	0	1		
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	Persentase invensi/inovasi yang terverifikasi			281.500.000		281.500.000		281.500.000		283.604.999		283.604.999	
5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah													

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	0	1	281.500.000	1	281.500.000	1	281.500.000	1	283.604.999	1	283.604.999,00	
5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi													
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.02.0003 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah													
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.02.0004 - Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah													

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		0	1		
5.05.03.2.02.0005 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional														
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional (Laporan)	0	1		0	1		0	1		0	1		0
5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual														
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	0	1		1		1		0	1		0	1	
5.05.03.2.02.0007 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi														
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	0	1		0	1		0	1		0	1		
5.05.03.2.02.0008 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi														

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah												
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organi sasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
5.05.03.2.02.0010 - Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat												
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	0	1	0	1	1	0	1	0	1		
5.05.03.2.02.0011 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.												

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi													
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	1	0	1		1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.02.0013 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah													
Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.02.0014 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah													
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.02.0015 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah													

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi													
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	0	1	0	1		1		1		0	1	0
5.05.03.2.02.0017 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi													
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi													
Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.02.0019 - Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi													
Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi (Naskah)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	

5.05.03.2.02.0020 - Fasilitas dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah													
Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.02.0021 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi													
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.02.0022 - Fasilitas dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah													
Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.02.0023 - Fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi													
Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.02.0024 - Fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah													

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.02.0025 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah													
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
5.05.03.2.02.0026 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset													
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1		1	0	
TOTAL ANGGARAN				14.067.366.766		21.660.932.991		19.682.727.416		20.210.656.206		22.424.931.841	

4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, perangkat daerah perlu menyusun dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan secara terarah, terukur, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Program prioritas tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga setiap perangkat daerah memiliki peran strategis untuk memastikan ketercapaian target pembangunan.

Untuk itu, diperlukan uraian yang lebih rinci mengenai subkegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas pembangunan. Subkegiatan ini tidak hanya menjadi instrumen operasional dalam pelaksanaan program, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk konkret keterkaitan antara rencana strategis perangkat daerah dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya uraian subkegiatan, diharapkan terlihat dengan jelas keterhubungan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan pembangunan, serta bagaimana alokasi sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut disajikan tabel Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, yang menggambarkan jenis kegiatan, keluaran yang diharapkan, serta relevansinya terhadap sasaran pembangunan daerah.

Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	Pengurangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	

			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan Pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah Meningkatkan pemanfaatan inovasi daerah dalam Pembangunan.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
			Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
			Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

			Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
			Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
			Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
			Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
			Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
			5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
			Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
			Invensi dan Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	

			Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	
			Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
			Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	
			Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	
			Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	
			Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2030 disusun sebagai pedoman untuk mengarahkan kerja pemerintah daerah dalam lima tahun ke depan. Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, strategi, hingga program yang akan dijalankan perangkat daerah agar sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Renstra bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi acuan agar pelaksanaan pembangunan dapat terukur, terarah, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Renstra, diperlukan ukuran yang jelas. Oleh karena itu, setiap tujuan dan sasaran diterjemahkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU inilah yang menjadi tolok ukur utama dalam mengukur kinerja perangkat daerah. Dengan adanya IKU, keberhasilan tidak hanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan umum, tetapi bisa dipantau secara konkret melalui capaian yang terukur dari tahun ke tahun. Penetapan target IKU Renstra 2025–2030 memperhatikan berbagai hal penting, seperti hasil pencapaian di periode sebelumnya, tantangan dan peluang pembangunan baik di tingkat global, nasional, maupun daerah, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, penyusunan IKU juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya agar tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan mendukung arah pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dengan demikian, uraian mengenai target IKU pada bagian berikut akan menjelaskan secara lebih detail arah capaian kinerja yang ingin diwujudkan perangkat daerah. Target ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung hasil pembangunan berupa pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan daerah yang berkelanjutan. Adapun Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator	Satuan	Target					2030	KET
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,10	3,20	3,50	3,70	3,90	4,00	

3	Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah	Nilai	80	80	80	90	90	100	
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	
5	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	71	73	75	77	79	81	
6	Indeks Inovasi Daerah	Indeks/Nilai	Innovatif	Innovatif	Innovatif	Innovatif	Innovatif	Innovatif	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan secara terarah dan dapat diukur tingkat keberhasilannya, maka diperlukan penetapan target kinerja yang jelas dan terukur. Target kinerja tersebut ditetapkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan adanya IKK, perangkat daerah dapat melakukan pengendalian, evaluasi, serta perbaikan kinerja secara berkelanjutan, sehingga arah pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

Penetapan target kinerja untuk periode tahun 2025–2030 ini tidak hanya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai hasil yang ingin dicapai pemerintah daerah. Dengan demikian, keberadaan IKK menjadi instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif. Berikut disajikan Target kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan daerah Tahun 2025–2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci

NO	Indikator	Satuan	Target						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Urusan Perencanaan									
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100	100	
Urusan Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah.	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase rekomendasi kebijakan Pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas, fungsi, serta arah kebijakan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Renstra ini disusun secara sistematis dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Dokumen ini menegaskan komitmen BAPPERIDA dalam menguatkan peran strategis sebagai lembaga perencana, pengendali, serta pusat riset dan inovasi daerah. Penetapan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) dalam Renstra ini dimaksudkan sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, sekaligus sebagai instrumen akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan Renstra BAPPERIDA 2025–2029 berlandaskan pada prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis data dan bukti ilmiah (evidence-based policy), serta berorientasi hasil. Untuk menjamin efektivitas implementasinya, dilakukan pengendalian melalui pemantauan, pelaporan, dan evaluasi tahunan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melalui sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi antara seluruh jajaran BAPPERIDA, perangkat daerah lain, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan komitmen bersama, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Barito Selatan dapat diwujudkan secara berkesinambungan demi tercapainya visi pembangunan daerah, yaitu:

“Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara.”

Akhirnya, Renstra ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen manajerial dan strategis yang memandu langkah nyata dalam membangun Kabupaten Barito Selatan yang lebih baik, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Buntok, 18 September 2025

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Selatan

